

**PROGRAM PRAKTIK KERJA MAHASISWA
PADA KANTOR PERWAKILAN WILAYAH BANK INDONESIA**

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA

**KANTOR PERWAKILAN WILAYAH BANK INDONESIA PROVINSI
JAWA BARAT**



Disusun oleh:

Monica Inda Sari

20171112118

STIE INDONESIA BANKING SCHOOL
Jalan Kemang Raya No. 35, Bangka Mampang Prapatan
DKI Jakarta 12730

2020

HALAMAN PERSETUJUAN



INDONESIA
BANKING
SCHOOL

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN INVITASI/PRAKTIK KERJA

Laporan Kegiatan Invitasi Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jawa Barat

Oleh

Nama : Monica Inda Sari
NIM : 2017 111 2118
Program Studi : Akuntansi

Bandung, Januari 2020

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Invitasi:

Pembimbing Lapangan

Bpk. Edi Komara, S.E, MSi.

Bpk. Darjana

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya saya bisa menyelesaikan laporan kegiatan praktik kerja kantor perwakilan wilayah bank indonesia provinsi jawa barat dengan baik. Penulis menyadari bahwa laporan magang ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala karunia kepada penulis selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
2. Orang tua dan keluarga penulis berkat doa dan bantuan mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, khususnya Divisi *Advisory* Ekonomi dan Keuangan Fungsi Data dan Statistik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan PKL;
4. Pak Taufik Saleh selaku Kepala Divisi *Advisory* Ekonomi dan Keuangan, Pak Darjana selaku Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Ibu Gina serta seluruh staf ahli (Pegawai FDSEK) yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis, memberikan informasi, sehingga penulis mendapatkan banyak pengetahuan;
5. Bapak Yogi, Karyawan Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang telah membantu proses dan administrasi PKL.
6. Teman-teman Magang :Ara, Kak Raka, Kak Rezky, Kak Bila, Kak Salma dan Kak Toufan yang senantiasa menjadi teman baik dan mengajarkan banyak hal pada penulis disaat awal mula penulis menjalankan program PKL.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa tentang Bank Indonesia dan dapat menjadi acuan dalam penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa. Perlu disadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna , oleh sebab itu, saya selaku penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Bandung, Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.2.1 Tujuan untuk Mahasiswa STIE Indonesia Banking School	2
1.2.2 Tujuan untuk STIE Indonesia Banking School	2
1.2.3 Tujuan KPwDN BI Provinsi Jawa Barat	3
1.3 Sistematika Penulisan Laporan	3
BAB II	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Bank Indonesia	5
2.1.1 Visi Bank Indonesia.....	5
2.1.2 Misi Bank Indonesia.....	5
2.2 Sistem Pembayaran.....	6
2.3 Kebijakan Moneter	8
2.3.1 Exchange Rate Targeting	10
2.3.2. Monetary Targeting	10
2.3.3. Inflation Targeting	11
2.4 Instrumen Kebijakan Moneter di Indonesia	11
BAB III.....	14
GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA	14
3.1 Sejarah Bank Indonesia	14

3.1.1 Sejarah Bank Indonesia KPwDN Bandung	15
□ Periode <i>De Javasche Bank Agentschap Bandoeng</i>	15
□ Masa Pendudukan Jepang.....	16
□ Periode Bank Indonesia	16
3.2 Produk-produk perusahaan (Cabang)	17
3.2.1 Divisi Advisory Ekonomi Keuangan.....	18
3.3 Struktur Organisasi KPwDN Jawa Barat.....	36
BAB IV	37
PEMBAHASAN	37
4.1 Divisi Advisory dan Ekonomi Keuangan	37
4.1.1 Kegiatan yang Dilakukan Selama Berada di Divisi Data & Statistik Ekonomi Keuangan.....	37
4.1.2 Kegiatan Lain-Lain:	39
BAB V.....	41
PENUTUPAN.....	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

Daftar Tabel

Tabel 1 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance ..	18
Tabel 2 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Data dan Statistik Ekonomi Keuangan	20
Tabel 3 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan	21
Tabel 4 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM .	23
Tabel 5 Tugas dan Produk Pokok Unit Distribusi Uang.....	24
Tabel 6 Tugas dan Produk Pokok Unit Layanan Administrasi.....	25
Tabel 7 Tugas dan Produk Pokok Unit Pengelolaan Uang	27
Tabel 8 Tugas dan Produk Pokok Unit Operasional Sistem Pembayaran	28
Tabel 9 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR ...	29
Tabel 10 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Analisis SP PUR, serta KI, dan Perlindungan Konsumen	30
Tabel 11 Tugas dan Produk Pokok Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol, dan Pengawasan	31
Tabel 12 Tugas dan Produk Pokok ICO	33
Tabel 13 Tugas dan Produk Pokok PM.....	34

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.	36
--	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Hasil Foto Kegiatan Magang.....	44
Lampiran 2 Surat Keterangan Magang	45
Lampiran 3 Daftar Hadir Magang.....	46
Lampiran 4 Catatan Harian Invitasi	47
Lampiran 5 Rencana Kegiatan Invitasi	50
Lampiran 6 Pelaksanaan Kegiatan Invitasi	51
Lampiran 7 Evaluasi Sikap	52
Lampiran 8 Evaluasi Keterampilan.....	54
Lampiran 9 Evaluasi Pengetahuan	55
Lampiran 10 Rekapitulasi Nilai Magang	56
Lampiran 11 Lembar Bimbingan dengan Dosen Pembimbing.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia Banking School merupakan Perguruan Tinggi yang memegang ijin resmi dari Dirjen Dikti dan didirikan pada tahun 2004. IBS didirikan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), suatu yayasan yang didirikan dan dibina oleh BANK INDONESIA, yang bertanggungjawab untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia bidang Keuangan dan Perbankan di Indonesia. YPPI memiliki beberapa lembaga, antara lain Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Salah satu tujuan dari Indonesia Banking School adalah Melalui tridarma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya) STIE IBS dapat menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki keunggulan keilmuan keuangan dan perbankan, memiliki keterampilan dalam bidangnya, profesional dan mandiri. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti: (1) integritas (*integrity*) diwujudkan dengan pengajaran tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, memelihara keutuhan NKRI, mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta memahami dan mengamalkan ke-Bhinneka Tunggal Ika serta memiliki sikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, disiplin, serta memiliki kesehatan jasmani, rohani, memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan emosional serta taat dalam beribadah. (2) Pengetahuan, dimana kemampuan dalam pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan (*knowledge*), teknologi dan seni (ipteks), dengan memahami secara ontologis, epistemologis dan aksiologis dari ipteks yang dipelajari dan dikembangkan, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan bagi kesejahteraan umat manusia (berilmu amaliah, beramal ilmiah). (3) keterampilan (*skill*) yaitu kemampuan dalam rangka pengembangan aspek psikomotoris, atau kinerja aksiologis dari ipteks yang sudah diperoleh untuk pengembangan pribadi dan masyarakat yang lebih baik,

dalam penerapannya di tataran praktik terutama di praktik keuangan dan perbankan. Dalam mewujudkan keterampilan, IBS memfasilitasi dan membekali para mahasiswa dengan program magang atau praktik kerja lapangan. Di semester lima para mahasiswa mengikuti program magang di Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, selama dua minggu dengan tujuan memperkenalkan, menambah wawasan dan produktivitas terhadap siswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia perbankan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan untuk Mahasiswa STIE Indonesia Banking School

1. Menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kerja.
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang Bank Indonesia KPwDN Bandung.
3. Mengembangkan skill mahasiswa terhadap praktik kerja yang dilakukan.
4. Mengimplementasikan pengetahuan dan skill yang di dapat kepada rekan mahasiswa dan lingkungan sekitar kampus.
5. Mencari pengalaman dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia pekerjaan yang riil.

1.2.2 Tujuan untuk STIE Indonesia Banking School

1. Menambah ilmu dan pengetahuan bagi instansi atau lembaga pendidikan mengenai Bank Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membantu pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja diberbagai perusahaan atau instansi seperti di Bank Indonesia.
3. Menjalin kerja sama dan mempererat hubungan yang baik antara pihak Bank Indonesia dengan STIE Indonesia Banking School.
4. Melatih dan mengembangkan nilai-nilai Indonesia Banking School yaitu; *integrity, knowledge* dan *skill*.
5. Melatih mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang akan datang.

1.2.3 Tujuan KPwDN BI Provinsi Jawa Barat

1. Sebagai sarana bagi Mahasiswa dalam memperoleh pengalaman awal dalam dunia kerja.
2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan pada instansi terkait.
3. Bagi instansi atau perusahaan, dalam hal ini Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, dapat memberikan gambaran tentang potensi tenaga kerja yang dibutuhkan.
4. Membuka kesempatan bagi generasi muda dalam menyampaikan aspirasinya.
5. Dapat mensosialisasikan pengetahuan tentang Bank Indonesia kepada masyarakat terutama lingkungan terdekat.

1.3 Sistematika Penulisan Laporan

1. BAB I
Bab I akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan pelaksanaan PKL bagi mahasiswa, instansi dan BI dan yang terakhir menjelaskan sistematika penulisan.
2. BAB II
Uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek tinjauan khusus selama PKL berdasarkan teori (dari buku teks) atau dari hasil penelitian baik jurnal, maupun hasil laporan penelitian yang lain.
3. BAB III
Bagian ini akan memberikan gambaran umum mengenai sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, produk-produk, struktur organisasi,serta fungsi dan tugas KpwBI tersebut.
4. BAB IV
Pada bab ini merupakan pembahasan hasil PKL di KPwDN sesuai pada penempatan di divisi DPSP, DAEK dan DPE. Pembahasannya menjelaskan mengenai pekerjaan yang dilakukan di masing-masing divisi.

5. BAB V

Bab lima terdiri dari kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan diuraikan beberapa hasil utama yang diperoleh selama PKL, terutama mengenai tugas khusus. Sedangkan pada saran, berisi mengenai pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank sentral republik Indonesia yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Stabilitas sistem keuangan

2.1.1 Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.

2.1.2 Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

2.2 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran di Bank Indonesia dibagi menjadi dua yaitu:

- **Alat Pembayaran Tunai**

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam

waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS).

- **Alat Pembayaran Nontunai**

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring. Sebagai informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent) seperti transaksi di Pasar Uang AntarBank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta settlement hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp174,3 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksinya hanya Rp8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini ngadat atau mengalami gangguan jelas akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum

memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai Systemically Important Payment System (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent). Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula System Wide Important Payment System (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas. Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.

Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya

2.3 Kebijakan Moneter

Menurut Perry Warjiyo, monetary policy adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (*monetary aggregates*) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework (ITF)*. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.

Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara *forward looking*, dan akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian *inherent* dalam *Flexible ITF*. Kerangka *Flexible ITF* dibangun berdasarkan 5 (lima) elemen pokok.

1. Pertama, inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter.
2. Kedua, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi.
3. Ketiga, penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
4. Keempat, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan.
5. Kelima, penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

2.3.1 Exchange Rate Targeting

Dalam melaksanakan exchange rate targeting, Bank Indonesia memiliki 3 alternatif. Yang pertama adalah, menetapkan nilai mata uang terhadap komoditas yang diakui secara internasional, seperti emas. Kemudian yang kedua adalah dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi yang rendah. Dan yang terakhir dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu, ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara (crawling peg) (Warjiyo & Solikin, 2003).

2.3.2. Monetary Targeting

Banyak negara tidak dapat mengacu kepada exchange rate targeting, karena tidak ada suatu negara yang yakin mata uangnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan kebijakan di negara lain. Maka dari itu, monetary targeting lebih dipilih oleh banyak negara. Monetary targeting adalah menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran. Misalnya, dengan uang beredar M1 dan M2 serta kredit. Kelebihan dari monetary targeting ini adalah menjadikan kebijakan moneter yang independen sehingga tujuannya dapat lebih difokuskan, yaitu tujuan dalam

merendahkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun karena semakin berkembangnya instrument keuangan dan integrasi antara domestic dan internasional, maka strategi ini banyak ditinggalkan oleh banyak negara (Warjiyo & Solikin, 2003).

2.3.3. Inflation Targeting

“Penargetan inflasi dilakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan mentargetkan inflasi sebagai jangkaran nominal, bank sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir” (Warjiyo & Solikin, 2003).

2.4 Instrumen Kebijakan Moneter di Indonesia

Bank Indonesia menasar uang primer (Mo) sebagai sasaran operasionalnya. Maka dari itu, dalam mendukung sasaran operasional ini, Bank Indonesia memiliki instrument-instrumen kebijakan moneter, yaitu:

1. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dalam rangka Operasi Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter. Operasi Pasar Terbuka dilakukan untuk mencapai target suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. OPT terdiri dari 2 jenis, yaitu:

- **OPT Absorpsi**

OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kelebihan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui penurunan suku bunga PUAB secara tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT absorpsi ini adalah (i) Penerbitan SBI dan SBIS, (ii) Penerbitan SDBI (iii) Transaksi Reverse Repo

SBN, (iv) Transaksi Penjualan SBN secara outright, (v) Penempatan berjangka (Term Deposit) dalam rupiah di Bank Indonesia dan (vi) Jual Valuta Asing terhadap Rupiah (dalam bentuk spot, forward atau swap). Peserta pada OPT Absorpsi adalah bank dan/atau lembaga perantara yang melakukan transaksi untuk kepentingan bank.

- **OPT Injeksi**

OPT injeksi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kekurangan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui peningkatan suku bunga PUAB secara tajam. Instrumen yang digunakan dalam OPT injeksi ini adalah (i) Transaksi Repo, (ii) Transaksi Pembelian SBN secara outright dan (iii) Beli Valuta Asing terhadap Rupiah (dalam bentuk spot, forward atau swap). Peserta pada OPT Injeksi adalah bank dan/atau lembaga perantara yang melakukan transaksi untuk kepentingan bank.

2. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto atau discount window merupakan instrument kebijakan moneter dimana bank sentral memberikan kredit kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian pengelolaan yang sifatnya hanya sementara.

3. Giro Wajib Minimum (GWM)

Implementasi Giro Wajib Minimum (GWM) Rata-rata merupakan kelanjutan dari rangkaian reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sejak 2016. GWM rata-rata merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang ditujukan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan, mendorong fungsi intermediasi perbankan, dan mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Berbagai sasaran ini pada

gilirannya akan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Sistem Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya bersifat fixed (tetap), dimana pemenuhan seluruh kewajiban giro wajib minimum primer harus dilakukan setiap akhir hari, diubah menjadi pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata-rata pada akhir periode tertentu.

Pada saat ini, dari total GWM Rupiah bank umum konvensional sebesar 6,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), porsi GWM Rata-rata Rupiah untuk bank umum konvensional adalah 2% dari DPK (berlaku sejak 16 Juli 2018). Sementara, dari total GWM Valas bank umum konvensional sebesar 8% dari DPK, porsi GWM Rata-rata valas mulai diberlakukan sebesar 2% dari DPK (berlaku sejak 1 Oktober 2018). Untuk bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), dari total GWM Rupiah sebesar 5% dari DPK, porsi GWM Rata-rata Rupiah mulai diberlakukan sebesar 2% dari DPK (berlaku sejak 1 Oktober 2018).

4. Imbauan

Yaitu memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya yaitu Bank Indonesia menghimbau perbankan yang memberikan kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar, atau sebaliknya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA

3.1 Sejarah Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebelumnya bernama *De Javasche Bank* yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Pada 1828 *De Javasche Bank* didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi *De Javasche Bank* sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh *De Javasche Bank* sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok Bank Sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamendemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga

stabilitas sistem keuangan. Amendemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini berdasarkan pada undang-undang baru, yaitu UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

3.1.1 Sejarah Bank Indonesia KPwDN Bandung

- **Periode *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng***

Pendirian Kantor Bank Indonesia Bandung atau dulubernama *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng* berawal dari adanya kekhawatiran pihak Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Munculnya Inggris menjadi negara *super power*, terutama armada lautnya dipandang sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat melakukan serangan ke seluruh koloni Belanda. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara Presiden *De Javasche Bank* ke-10 J. Reijnsenbach dengan pemerintah Hindia Belanda, dilakukan upaya pengamanan kekayaan bank dari daerah pantai ke pedalaman dan Bandoeng dianggap sebagai lokasi yang tepat bagi penyimpanan kekayaan bank tersebut.

Keinginan membangun kantor *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng* dilaporkan kepada Dewan Militer dan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1902. Selanjutnya keinginan tersebut ditanggapi oleh Sekretaris Pertama Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1903. Pelaksanaan pembangunan sempat mengalami penundaan 3 tahun karena pertimbangan

telah didirikannya kantor cabang *De Nederlandsche Handelsbank* (sekarang Bank Mandiri) pada tahun 1903.

Persetujuan pendirian *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng* dimulai setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jenderal No.44 tanggal 9 Desember 1908. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 1909 *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng* resmi dibuka, meskipun masih menggunakan gedung sementara. Gedung *Agentschap Bandoeng* sendiri baru mulai dibangun secara permanen tahun 1915. Pada tanggal 5 Mei 1918 yaitu pada masa kepemimpinan L.W. van Suchtelen, pembangunan dinyatakan selesai dan mulai digunakan.

- **Masa Pendudukan Jepang**

Gedung kantor di Jalan Braga digunakan *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng* hingga tahun 1942, yaitu pada masa penjajahan Jepang dimulai. Tidak diketahui dengan pasti penggunaan atas gedung kantor tersebut pada masa itu. Besar kemungkinan gedung digunakan sebagai salah satu kantor bank Jepang yang beroperasi pada masa itu. Ketika Jepang menyerah pada sekutu tahun 1945, salah satu yang dilakukan pemerintah Belanda saat kembali ke Indonesia adalah mengaktifkan bank-bank Belanda yang dilikuidasi pada masa pendudukan Jepang. Dalam rapat Direksi tanggal 9 Mei 1946, *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng* dinyatakan dibuka kembali dengan tetap menggunakan gedung kantor semula.

- **Periode Bank Indonesia**

Kehadiran *De Javasche Bank* di Indonesia berakhir pada tahun 1953, ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Gedung *De Javasche Bank Agentschap Bandoeng* digunakan sebagai gedung Bank Indonesia cabang Bandung. Dengan disahkannya UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, maka berakhirilah aktivitas komersial Bank Indonesia, yang dilakukan sejak jaman *De Javasche Bank*. Sejak saat itu Bank Indonesia berperan sebagai agen pembangunan disamping peran utamanya sebagai Bank Sentral.

Berkaitan dengan perannya yang baru ini, aktivitas Bank Indonesia semakin banyak dan beragam. Hal ini menyebabkan sarana pendukung yang digunakan pada waktu itu dirasakan kurang memadai. Untuk memenuhi sarana pendukung tersebut, maka pada tahun 1982 dilakukan renovasi gedung kantor yang memakan waktu sekitar 9 bulan, dengan melakukan penambahan ruang kerja dengan tidak mengubah sosok gedung asli, yaitu tambahan ruangan di lantai dua seluas + 400Meter persegi, sehingga luas kantor seluruhnya menjadi sekitar 800 Meter persegi.

Sejak dikeluarkannya paket kebijakan tahun 1983, sektor perbankan nasional berkembang pesat. Di Jawa Barat kondisi ini menyebabkan timbulnya kebutuhan akan adanya koordinasi antar kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat agar aktivitas perekonomian, khususnya sektor perbankan dapat berjalan lebih lancar. Sejalan dengan kepentingan ini, maka sejak tanggal 19 Maret 1986 Kantor Bank Indonesia Bandung ditetapkan sebagai koordinator kantor-kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat (Tasikmalaya dan Cirebon). Fungsi koordinator ini pada tahun 1996 diperluas hingga meliputi wilayah Bandar Lampung dan Palembang.

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas KBI Bandung dalam perekonomian regional dan nasional, dirasakan daya tampung gedung lama dirasakan sudah kurang memadai. Untuk itu, Direksi Bank Indonesia memutuskan untuk memperluas gedung Kantor Bank Indonesia Bandung. Perluasan bangunan baru tersebut menempati lahan seluas + 13.730 Meterpersegi, dengan luas bangunan sekitar 11.900 meter persegi yang terdiri dari 7 lantai. Gedung baru yang desainnya disamakan dengan gedung lama ini diresmikan oleh Gubernur BI Syahrir Sabirin tanggal 18 Mei 1998.

3.2 Produk-produk perusahaan (Cabang)

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia tersebut di daerah disederhanakan menjadi 9 fungsi utama KPwDN yang mencakup tugas Moneter, SP & PUR, UMKM, Komunikasi Kebijakan dan MI sebagai supporting.

1. Moneter/SSK, Fungsi KPwDN sebagai strategic advisory roadmap TPID dan mendorong investasi di daerah
2. Moneter/SSK, Regional financial surveillance serta penanganan dan pengumpulan data SSK
3. Moneter/SSK, fungsi statistic yaitu dalam integrasi indikator ekonomi daerah
4. SP dan PUR, fungsi pengelolaan uang dalam hal perkasan dan pendistribusian uang
5. SP dan PUR, berperan dalam fungsi pengawasan sistem pembayaran
6. SP dan PUR, fungsi sistem pembayaran dalam hal elektronifikasi daerah
7. UMKM/FI, melakukan fungsi keuangan inklusif pada UMKM
8. Komunikasi Kebijakan, melakukan komunikasi dalam hal menyajikan spokesperson di daerah
9. MI, melakukan fungsi operasional dalam hal SDM, perencanaan, dan keuangan.

3.2.1 Divisi Advisory Ekonomi Keuangan

Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance

Tabel 1 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1.	Melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.	Asesmen ekonomi daerah, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEER) Provinsi, Ringkasan Ekonomi Regional (RER), Laporan Analisis Inflasi. b) Kajian bersama dengan Satuan Kerja Kantor Pusat

		<p>dan/atau Departemen Regional.</p> <p>c) <i>Analytical Notes/Occasional Paper</i> dan/atau Kajian Isu Strategis.</p>
2	Melakukan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat.	Fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan perekonomian daerah dan/atau penyusunan rencana aksi.
3	Melaksanakan Regional <i>Financial Surveillance</i> (RFS).	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan Regional <i>Financial Surveillance</i> (RFS), a.l : Laporan <i>Surveillance</i> sistem keuangan sewaktu-waktu; Laporan pemeriksaan; Laporan riset tematik, dll • Data & informasi untuk pengawasan moneter, <i>Surveillance</i> Sistem Keuangan, SP dan PUR, dan market berdasarkan risk based.
4	Menyusun proyeksi makro ekonomi daerah.	Hasil proyeksi an asumsi makro ekonomi daerah.
5	Menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.	Rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah kepada Kepala Daerah (advisory)

Fungsi Data dan Statistik Ekonomi Keuangan

Tabel 2 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Data dan Statistik Ekonomi Keuangan

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Menusun <i>Regional Financial Account</i> dan/atau <i>Regional Balance Sheet</i> (RFA dan/atau RBS).	RFA atau RBS
2	Mengumpulkan informasi, mengolah dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> • Buku SEKDA; • Data olahan (a.l moneter, stabilitas sistem keuangan, SP dan PUR).
3	Melaksanakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory.	Statistik dan/atau laporan hasil survei.
4	Melaksanakan kegiatan <i>liaison</i> dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diary Notes Liaison</i> • Laporan <i>liaison</i> bulanan dan triwulan
5	Mengelola dan menata usahakan laporan bank dan non-bank (a.l sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layanan helpdesk).	Data laporan bank dan non-bank (a.l sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layanan helpdesk).
6	Melaksanakan komunikasi dan klarifikasi terkait dengan	Informasi terkait pemenuhan GWM bank yang berkantor pusat di wilayah

	pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) bank yang berkantor pusat di wilayah KPwDN atas permintaan satuan kerja Kantor Pusat terkait.	KPwDN.
--	--	--------

3.2.2 Divisi Pengembangan Ekonomi

Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

Tabel 3 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Melakukan koordinasi dan program kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan hubungan investor.	Kegiatan kerjasama pengembangan ekonomi daerah (a.l RIRU, peningkatan daya saing, investasi, ekonomi dan keuangan syariah);
2	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pengendalian inflasi dalam wilayah kerja dan/atau antar wilayah kerja	Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi (a.l <i>high level meeting</i> , rapat teknis, rapat koordinasi dalam wilayah kerja, dan kegiatan lain terkait pengendalian inflasi).
3	Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategis BI Wide (<i>One Voice</i>), termasuk memfasilitasi/mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi satuan kerja kantor pusat di daerah.	Laporan pelaksanaan program komunikasi kebijakan dan isu strategis BI-Wide di daerah (a.l <i>media briefing, focus group discussion, seminar dan talkshow</i>).

4	Menyusun dan melaksanakan program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya, termasuk melakukan penyesuaian terhadap materi/publikasi eksternal sesuai dengan kebutuhan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana kegiatan; • Laporan pelaksanaan program komunikasi dan materi komunikasi di daerah (a.l media <i>briefing</i>, <i>focus group discussion</i>, seminar dan <i>talkshow</i>).
5	Melaksanakan forum-forum terkait dengan pengembangan dan kerjasama ekonomi yang melibatkan <i>stakeholders</i> daerah.	Terlaksananya program <i>networking</i> /jejaring dengan <i>stakeholders</i> daerah melalui forum-forum koordinasi di daerah.
6	Melakukan kegiatan sosialisasi dan <i>capacity building</i> kepada <i>stakeholders</i> .	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan <i>capacity building</i> .
7	Menyediakan layanan informasi publik (termasuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi/PPID daerah).	Pelayanan data dan informasi kepada publik.
8	Mengelola pelaksanaan program sosial Bank Indonesia (PSBI), termasuk beasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan dan strategi pelaksanaan PSBI; • Laporan pelaksanaan PSBI, termasuk beasiswa.
9	Melaksanakan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.	Pelaksanaan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.
10	Mengelola perpustakaan Bank Indonesia.	Pengelolaan perpustakaan Bank Indonesia.

Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tabel 4 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian dan rekomendasi dalam rangka mendorong pengembangan UMKM; • Terlaksananya kegiatan bantuan teknis (penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan/atau fasilitas); • Implementasi program pengembangan UMKM (a.l pengembangan komoditi strategis, program pengembangan ekonomi berbasis komunitas, <i>Local Economic Development</i> (LED), <i>Value Chain Financing</i>, Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah/PPKD, credit rating).
2	Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM (a.l melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitasi program pemerintah yang	Terlaksananya fasilitasi upaya peningkata akses UMKM kepada perbankan (a.l melalui penyusunan lending model, <i>Value Chain Financing</i> , PPKD, <i>credit rating</i>).

	memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).	
3	Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM.	Penyediaan informasi terkait UMKM (a.l data profil UMKM, data hasil kajian Komoditas Produk Jenis Usaha Unggulan/KPJU UMKM dan lending model).
4	Melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders setempat dalam rangka pengembangan UMKM.	Laporan koordinasi dan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> (pemerintah daerah, perbankan dan internal Bank Indonesia).

3.2.3 Divisi SP dan PUR

Unit Distribusi Uang

Tabel 5 Tugas dan Produk Pokok Unit Distribusi Uang

No	Tugas Pokok	● Produk Pokok
1	Melaksanakan distribusi uang.	<ul style="list-style-type: none"> ● Distribusi uang (a.l pengiriman uang) di wilayah kerjanya; ● Penerimaan/persediaan uang ● Pengiriman uang kas titipan; ● Pengambilan uang kas titipan.
2	Melakukan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Modal kerja harian;

	khazanah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan dan pengembalian uang ke khazanah; • Pengelolaan barang titipan pada khazanah
3	Menyusun rencana distribusi uang	RDU mengacu pada Estimasi Kebutuhan Uang (EKU).

Unit Layanan dan Administrasi

Tabel 6 Tugas dan Produk Pokok Unit Layanan Administrasi

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Melaksanakan pelayanan kas.	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan penarikan bank; • Layanan penyetoran bank; • Layanan penukaran uang; • Layanan kas luar kantor; • Layanan penarikan dan penyetoran non bank (a.l. setoran dan penarikan intern pajak); • Administrasi penyetoran dan penarikan bank peserta kas titipan; • Layanan penjualan uang Rupiah khusus kepada masyarakat; • Pengelolaan dan PUR.
2	Melakukan administrasi dan analisis upal, termasuk yang dilakukan di laboratorium upal : <ul style="list-style-type: none"> • Klarifikasi keaslian uang 	Klarifikasi keaslian uang Rupiah; Hasil analisis yang diinput ke database upal pada BI-CAC; Keterangan ahli.

	<p>Rupiah dari perbankan, masyarakat, dan aparat penegak hukum (kejaksaan, POLRI);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis dan tata usaha upal (a.l. melalui BI <i>Counterfeit Analysis Center/BI-CAC</i>); • Pemberian keterangan ahli terkait dengan keaslian uang Rupiah. 	
3	<p>Melakukan administrasi dan helpdesk setoran dan penarikan bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kegiatan pelaporan posisi likuiditas, Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), dan rencana penyetoran dan penarikan bank; • Administrasi data penyetoran dan penarikan bank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan posisi likuiditas bank, TUKAB, dan rencana penyetoran penarikan bank; • Tata usaha perbankan pada aplikasi sistem layanan kas; • Evaluasi proyeksi <i>cash flow</i> dan realisasi kebutuhan uang perbankan; • Koordinasi penanganan tindak pidana upal.
4	<p>Melakukan pembukuan transaksi layanan kas.</p>	<p>Warkat pembukuan transaksi layanan kas</p>

Unit Pengelolaan Uang

Tabel 7 Tugas dan Produk Pokok Unit Pengelolaan Uang

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Melakukan perencanaan modal kerja dan melaksanakan kegiatan pengolahan uang	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana dan pelaksanaan kegiatan pengolahan uang: • Sortasi dan hitung ulang manual; • Sortasi uang dengan Mesin Sortasu Uang Kertas (MSUK): • Permusnahan uang dengan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK).
2	Melakukan pemeliharaan peralatan pengolahan uang dan memantau persediaan <i>supplies</i> . (a.o. Mesin Hitung Uang Kertas (MHUK) dan Mesin Hitung Uang Logam (MHUL), MSUK, MRUK).	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan mesin untuk pengolahan uang; • Laporan pemeliharaan peralatan pengolahan uang secara periodik, termasuk <ul style="list-style-type: none"> ● laporan <i>downtime</i>; • Laporan penggunaan peralatan pengolahan uang secara periodik; • Ketersediaan <i>supplies</i> (perlengkapan operasional) kas.

Unit Operasional Sistem Pembayaran

Tabel 8 Tugas dan Produk Pokok Unit Operasional Sistem Pembayaran

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Mengelola pembukuan transaksi internal dan eksternal	Pengelolaan pembukuan transaksi internal dan eksternal meliputi proses awal hari (BI-SOSA), Transaksi realisasi anggaran, Pembuku Transaksi Anggaran (PTA), Setelmen transaksi melalui BI-SOSA, Mencetak laporan keuangan, dan Mengelola transaksi proses akhir hari (BI-SOSA)
2	Mengelola <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) SP	Laporan pelaksanaan BCP termasuk tersedianya layanan <i>guest bank</i> *) (a.i. SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS dan BI-ETP).
3	Mengelola administrasi dan tata usaha Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan <i>Two Step Loan</i> (TSL).	Administrasi dan tata usaha KLBI dan TSL.
4	Melaksanakan perizinan (pembukuan, perpanjangan, dan pencabutan) Kegiatan Layanan Uang (KLU).	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Kegiatan Usaha Pedagan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVABB) dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD); • Izin pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) • Izin KPWD non BI.

5	Melaksanakan pengawasan KLU.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan KUPVA BB dan PTD. • Laporan pengawasan pembawaan UKA; • Laporan KPWD • Laporan pengawasan kewajiban penggunaan uang Rupiah.
---	------------------------------	---

Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR

Tabel 9 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Melaksanakan perizinan (pembukuan, perpanjangan, dan pencabutan) Kegiatan Layan Uang (KLU).	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Kegiatan Usaha Pedangan Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD); • Izin pembawaan Uang Kertas Asing (UKA); • Izin KPWD non BI.
2	Melaksanakan Pengawan KLU.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengawasan KUPVA BB dan PTD; • Laporan pengawasan pembawaan UKA; • Laporan KPWD; • Laporan pengawasan

		kewajiban penggunaan uang Rupiah.
3	Memberikan rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan, serta melaksanakan pengawasan kas titipan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi pembukaan dan perpanjangan/penutupan kas titipan; • Laporan pengawasan kas titipan.

Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

Tabel 10 Tugas dan Produk Pokok Fungsi Analisis SP PUR, serta KI, dan Perlindungan Konsumen

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Merencanakan dan melaksanakan program KI.	Rencana dan laporan pelaksanaan program KI (a.i. elektronifikasi).
2	Menghitung EKU	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil survei kebutuhan dan preferensi uang; • Usulan EKU kepada Kantor Pusat; • Evaluasi kecukupan kas; • Statistik pengelolaan uang.
3	Mengelola data dan informasi SP dan PUR serta KI	Data dan informasi SP dan PUR. Serta KI.
4	Menyusun analisis/kajian terkait SP dan PUR serta KI	Hasil analisis/kajian SP dan PUR serta KI
5	Melakukan koordinasi/kerjasama dan atau implementasi program KI	Laporan koordinasi/kerjasama dan/atau implementasi program KI.

6	Memberikan layanan informasi dan mediasi perlindungan konsumen SP	Layanan informasi dan mediasi pengaduan konsumen SP termasuk pemberian keterangan ahli.
---	---	---

3.2.4. Satuan Layanan Administrasi

Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan

Tabel 11 Tugas dan Produk Pokok Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol, dan Pengawasan

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Melakukan administrasi data dan informasi SDM di satuan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan dan administrasi gaji serta penghasilan pegawai; • Layanan dan administrasi manfaat serta fasilitas pegawai dan keluarga pegawai (a.i fasilitas kesehatan, peringatan masa pengabdian); • Administrasi kehadiran dan data kepegawaian; • Administrasi pelaksanaan ketentuan disiplin dan tata tertib pegawai satuan kerja; • Rekapitulasi kebutuhan pengembangan SDM satuan kerja;

		<ul style="list-style-type: none"> • Data dan informasi SDM satuan kerja dan KPwDN yang berada dibawahnya; • Administrasi kepegawaian lainnya satuan kerja dan KPwDN yang berada di bawahnya.
2	Mengelola SDM non-organik.	Pelaksanaan pengelolaan SDM non-organik: Penerimaan, penempatan, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja serta pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan berlaku.
3	Melakukan fungsi Pelaksanaan Anggaran (PA) dan administrasi pajak satuan kerja	WRA dan laporan realisasi anggaran satuan kerja; Administrasi perpajakan.
4	Melakukan Penghitungan, koreksi, penyetoran dan pelaporan pajak Kantor Perwakilan Bank Indonesia.	Hasil penghitungan, koreksi, penyetoran dan pelaporan pajak Kantor Perwakilan Bank Indonesia
5	Mengelola administrasi perjalanan dinas satuan kerja.	Administrasi dan layanan perjalanan dinas satuan kerja
6	Melakukan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, Alat Tulis Kantor (ATK) satuan kerja.	Perencanaan, pemenuhan, penatausahaan, dan pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, ATK satuan kerja.
7	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan satuan kerja.	Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dan kearsipan (a.i. penatausahaan dokumen keluar/masuk, penatausahaan

		arsip di Sentral Khasanah Arsip).
8	Mengelola kegiatan protokoler.	Terlaksananya kegiatan protokoler
9	Menyediakan akomodasi, transportasi, perizinan, sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keprotoklan di wilayah kerjanya.	Tersedianya akomodasi, transportasi, dan perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kedinasan di wilayah kerjanya.
10	Melaksanakan kegiatan operasional pengamanan personil, materil, lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak internal dan/atau eksternal, di wilayah kerjanya.	Terlaksananya kegiatan operasional pengamanan personil, materil, lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak internal dan/atau eksternal, di wilayah kerjanya.
11	Melaksanakan pengelolaan peralatan pengamanan di wilayah kerjanya.	Terlaksananya pengelolaan (a.l. pengoperasian, pemeliharaan, uji coba) peralatan pengamanan di wilayah kerjanya.

3.2.5 ICO

Tabel 12 Tugas dan Produk Pokok ICO

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Bertanggung jawab mereview dan mengkoordinasikan profil risiko satker dan KPwDN di bawahnya.	Laporan profil risiko satuan kerja dan KPwDN di bawahnya.
2	Bertanggung jawab mengkoordinasikan rencana pemantauan pengendalian intern	Rencana pemantauan pengendalian intern satker dan KPwDN di bawahnya.

	satker dan KPwDN di bawahnya.	
3	Bertanggung jawab mereview hasil pemantauan pengendalian intern satuan kerja dan KPwDN di bawahnya	Laporan hasil pemantauan dan rekomendasi pengendalian intern satuan kerja dan KPwDN di bawahnya.
4	Beertanggung jawab memantau tindak lanjut rekomendasi pengendalian intern satuan kerja dan KPwDN di bawahnya	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan intern satuan kerja dan KPwDN di bawahnya
5	Bertanggung jawab memberikan konsultasi dan informasi terkait pengelolaan manajemen risiko di Bank Indonesia	Laporan hasil konsultasi dan informasi terkait pengelolaan manajemen risiko di Bank Indonesia.
6	Bertanggung jawab akhir (akuntabel) melaksanakan kegiatan <i>liaison</i> dengan auditor eksternal (BPKRI) dan internal (DAI).	Pelaksanaan dan laporan kegiatan <i>liaison officer</i> dengan auditor eksternal (BPKRI) dan internal (DAI).

3.2.6 PM

Tabel 13 Tugas dan Produk Pokok PM

No	Tugas Pokok	Produk Pokok
1	Bertanggung jawab menyusun usulan/penyesuaian/perubahan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja serta mengkoordinasikan penyusunan, monitoring dan evaluasi program kerja, anggaran dan	Usulan IKU, Kontrak Kinerja dan PKARI KPwDN (komunikasi arahan tahunan, <i>monitoring</i> , evaluasi dan informasi pelaksanaan PKARI serta <i>monitoring</i> alokasi anggaran unit kerja).

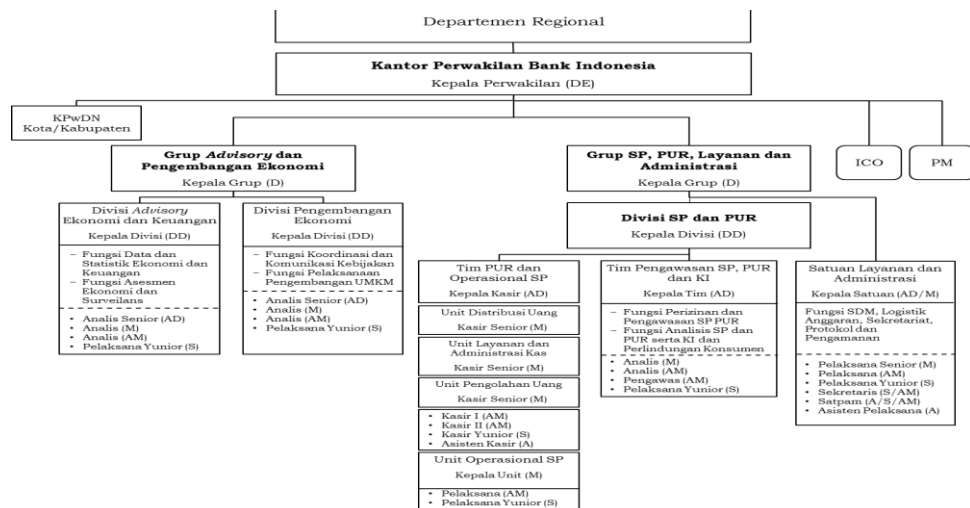
	rencana investasi (PKARI) KPwDN beserta penjelasannya.	
2	Bertanggung jawab mendukung penyusunan bahan Evaluasi Kinerja Bulanan (EKB) yang meliputi monitoring, updating, koordinasi & evaluasi pencapaian kinerja serta program kerja dan anggaran KPwDN (beserta KPwDN di wilayah kerjanya).	Bahan Evaluasi Kinerja Bulanan (EKB) KPwDN (beserta KPwDN kota di wilayah kerjanya).
3	Bertanggung jawab menjalankan analisis dan koordinasi untuk mengakslerasi dan debottlenecking permasalahan terkait pencapaian kinerja KPwDN	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan debottlenecking serta usulan solusi permasalahan pencapaian kinerja KPwDN
4	Bertanggung jawab membantu Line Manager dalam penyusunan IKI pegawai yang selaras dengan kontrak kinerja KPwDN sd. Level Divisi	Terselenggaranya pendampingan penyusunan IKI pegawai yang selaras dengan kontrak kinerja KPwDN
5	Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menyelaraskan <i>Change Program</i> dengan program kerja KPwDN	Terkoordinasikan dan tersearaskannya <i>Change Program</i> dengan program kerja KPwDN
6	Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi pengembangan pegawai.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai.
7	Bertanggung jawab memantau tindak lanjut RDG dan berbagai	Terlaksananya pemantauan tindak lanjut RDG dan berbagai arahan

	arahan ADG dalam forum yang dihadiri DG terkait pelaksanaannya tugas KPwDN.	ADG dalam forum yang dihadiri DG terkait pelaksanaan tugas KPwDN.
8	Bertanggung jawab mengkoordinasikan penyusunan usulan/perubahan/penyesuaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja serta penyusunan, monitoring dan evaluasi Program Kerja, Anggaran dan Rencana Investasi (PKARI) dari KPwDN kota di wilayah kerjanya.	Koordinasi usulan IKU, Kontrak Kinerja dan PKARI Satuan Kerja (komunikasi arahan tahunan, <i>monitoring</i> , evaluasi dan informasi pelaksanaan PKARI serta monitor alokasi anggaran unit kerja) dari KPwDN Kota di wilayah kerjanya.

3.3 Struktur Organisasi KPwDN Jawa Barat

Berikut adalah struktur organisasi di Bank Indonesia KPwDN Jawa Barat:

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Divisi Advisory dan Ekonomi Keuangan

4.1.1 Kegiatan yang Dilakukan Selama Berada di Divisi Data & Statistik

Ekonomi Keuangan

Magang di divisi data & statistik ekonomi keuangan berlangsung selama 2 minggu (14 hari). Mulai dari tanggal 20-31 Januari. Kegiatan yang dilakukan pada divisi data & statistik keuangan ekonomi, yaitu:

- 1) Membuat surat pelaksanaan Survei Pemantauan Harga (SPH) sesuai dengan format yang telah diberikan.
- 2) Diberikan bahan bacaan mengenai laporan dari 4 sektor makroekonomi, yaitu: APBN yang berasal dari sektor fiskal, neraca pembayaran yang berasal dari sektor eksternal, PDB yang berasal dari sektor riil, dan yang terakhir adalah laporan dari otoritas moneter berupa jumlah uang primer yang diedarkan, operasi pasar terbuka, dan lainnya. Yang kemudian didiskusikan bersama Pak Darjana selaku ketua tim fungsi asesmen dan surveillance ekonomi keuangan. Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal;
 - a) Pendapatan negara bersumber dari Hibah, Pajak, Laba BUMN, dan Surplus Bank Indonesia.
 - b) Terdapat 2 komponen terbesar belanja Negara, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer untuk daerah.
 - c) Defisit Negara mencerminkan penerimaan lebih rendah dari investasi.
 - d) Financial deepening merupakan cara agar investor asing tidak menarik keuntungan yang diperoleh dari hasil menanamkan

modalnya di Indonesia. Cara yang dilakukan adalah bagaimana keempat sektor tersebut berkaitan satu sama lain.

- 3) Membuat surat perihal kegiatan Liaison yaitu kegiatan rutin setahun sekali yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mengunjungi para pelaku usaha untuk mewawancara langsung guna mendiskusikan atau mengetahui secara dini arah pergerakan dan perkembangan dunia usaha.
- 4) Memindahkan data harga dan alasan pasar yang ada di Jawa Barat (Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, Sukabumi). Sesuai dengan format excel yang diberikan dan Dilakukan seminggu sekali.
- 5) Mencari data kontak (email, no telp, pic) terkait PT baru dan existing yang mengikuti kegiatan Liaison.
- 6) Mengirim e-mail kepada pelaku usaha (PT), perihal kegiatan Liaison.
- 7) Menghubungi PIC (PT) dari hasil data kontak yang sebelumnya dicari, dengan tujuan mengkonfirmasi kesediaan waktu kapan Bank Indonesia bisa melakukan kunjungan perihal kegiatan Liaison.
- 8) Mengeprint dan mempersiapkan Diary Notes yang akan dibawa dan digunakan dalam proses wawancara kegiatan Liaison.
- 9) Mengupdate dan mengecek apakah hasil survei konsumen Bank Indonesia yang dilakukan oleh RAD Research sudah sesuai dengan hasil rekaman dengan kuisisioner yang telah diisi.
- 10) Diberikan buku bacaan tentang perekonomian Jawa Barat yang dibuat langsung oleh Divisi Advisory dan Ekonomi Keuangan. Dari buku itu kita disuruh memaparkan dari apa yang kita baca tentang Jawa Barat, setiap orang membahas 1 bab.
- 11) Mengupdate data kuisisioner dari 300 lebih responden, hanya 47 responden yang diambil untuk sampling. Dan dicek apakah jawaban data telah sesuai dengan jawaban kuisisioner.

- 12) Mencari data korporasi perdagangan besar dan ecer (nama perusahaan, alamat, pendapatan, dll) yang sudah listing dan memberikan kontribusi untuk Jawa Barat.

4.1.2 Kegiatan Lain-Lain:

- 1) Melakukan kunjungan pada area Khazanah (brangkasnya Bank Indonesia). Sebelum memasuki area khazanah harus dilakukan *body checking* (sterilisasi) dan menggunakan semacam jas lab, disana kita bisa melihat proses pemusnahan uang dari yang utuh menjadi serpihan kecil-kecil dengan menggunakan mesin. Disana ada juga tempat pengelolaan uang rupiah (PUR), dimana sistem bisa menghitung dan mengetahui apakah uang tersebut layak edar atau tidak sampai proses pengikatan dengan alat dan uang dimasukkan kedalam kantong plastik dengan jumlah 1 kantong plastik senilai Rp 500.000.000.
- 2) Melakukan kunjungan pada area Kliring. Proses transfer dana dari bank ke bank lainnya, melalui cek/bilyet giro. Disana juga ada bagian *accounting* yaitu mencatat keluar masuknya uang.
- 3) Mengikuti Klasikal (pemaparan materi dari setiap divisi)
 - Pada tanggal 29 Januari klasikal dari divisi Sistem Pembayaran (SP) mengenai alat pembayaran non-tunai, dilanjut materi dari Divisi Advisory Ekonomi Keuangan bagian asesmen mengenai tugas pokok asesmen yang dihubungkan dengan tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia.
 - Pada tanggal 30 Januari Klasikal dari Divisi Kliring mengenai tentang kliring sampai proses kliring.
 - Pada tanggal 31 Januari materi dari Pak Syafii selaku Kepala Divisi Sistem Pembayaran (SP), mengenai uang tunai dari perencanaan sampai proses pemusnahan.

- 4) Mengikuti kegiatan senam rutin dan vidcall yang diadakan oleh Bank Indonesia setiap hari jumat.



BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Bank Indonesia adalah Bank Sentral yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan didukung oleh tiga pilar yaitu; (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga sistem pembayaran dan (3) stabilitas sistem keuangan. Dalam mewujudkan visi dan misinya Bank Indonesia melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagai lembaga otoritas, yaitu; mengembangkan alat pembayaran non-tunai dengan digitalisasi contohnya QRIS (satu QR code untuk semua pembayaran), penyelenggaraan kliring dengan penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia di Indonesia. Khusus transaksi non-tunai dengan nilai besar diselenggarakan melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement). Salah satu tugas Bank Indonesia adalah “menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter” dengan tujuan menjaga angka inflasi, dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal dalam mencapai kestabilan harga. Untuk menjaga angka inflasi dapat dilakukan dengan cara menerapkan instrumen kebijakan moneter, yaitu Operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto dan giro wajib minimum. Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia tidak sendiri, dibantu oleh kantor perwakilan daerah Bank Indonesia di seluruh Indonesia. KPwDN memiliki fungsi utama; sebagai strategic advisory roadmap TPID, regional financial surveillance, fungsi statistik, sistem pembayaran dalam hal elektronifikasi daerah, keuangan inklusif pada UMKM, komunikasi kebijakan dan terakhir fungsi operasional dalam hal SDM, perencanaan dan keuangan. Untuk pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat, KPwDN banyak melakukan kontribusi seperti; membuat EKRAF (Ekonomi Kreatif), melakukan sosialisasi dengan masyarakat Jawa Barat, melakukan riset dan suvei kepada perusahaan/pelaku usaha yang ada di Jawa Barat untuk mengetahui arah pergerakan usaha yang nantinya terkait dengan PDB (Produk Domestik Bruto), melakukan pengawasan/kontrol kepada pasar-pasar

yang ada di Jawa Barat baik pasar tradisional maupun modern untuk mengetahui perkembangan harga yang terjadi terkait dengan tingkat inflasi.

5.2 Saran

Setelah melakukan PKL (Praktik Kerja Lapangan) selama 10 hari di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Berikut saran yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi.

Saran untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat:

1. Saran saya untuk kedepannya, bila ada yang sedang PKL mungkin bisa diperlakukan dengan baik dan PIC PKL ada baiknya tidak hanya satu orang, jadi apabila tidak bisa dihubungi bisa menghubungi PIC yang lain.
2. Meningkatkan fasilitas, karena sekarang sudah era digitalisasi alangkah baiknya bila kantin yang ada di KPwDN Jawa Barat mengurangi cashless dan menggunakan non-tunai (QRIS) yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Menjaga dan meningkatkan fasilitas yang sudah ada di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.

Saran untuk STIE Indonesia Banking School:

1. Adanya penambahan waktu PKL, mungkin 1 bulan (normalnya mahasiswa magang).
2. Komitmen dengan peraturan/kebijakan yang telah dibuat untuk Praktik Kerja Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

www.bi.go.id

Sugiono, F. X. (2004). Operasi Moneter: Operasi Pasar Terbuka. Retrieved from <http://www.bi.go.id/id/moneter/operasi/operasi-pasarterbuka/Contents/Default.aspx>

Warjiyo, P., & Solikin. (2003). Kebijakan Moneter Di Indonesia. Seri Kebanksentralan No.6.

Indonesia, B. (2019). *Mengenal Lebih Dekat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat*. Bandung: KPw Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.



Lampiran 1 Hasil Foto Kegiatan Magang



Lampiran 2 Surat Keterangan Magang



No.22/187/Bd/Srt/B

Bandung, 31 Januari 2020

Kepada Yth.
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Banking School
JAKARTA

Perihal: Magang/Kerja Praktek

Menunjuk surat Saudara No. 347/k-Um/STIE IBS/XI/2019 tanggal 4 November 2019 perihal Permohonan Bantuan Tempat Magang/Kerja Praktek, bersama ini kami informasikan bahwa:

Nama : Monica Inda Sari
NIM : 20171112118
Program Studi : Akuntansi
Instansi : STIE Indonesia Banking School

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan selama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI JAWA BARAT

Analisis Senior,

Darjana
Asisten Direktur



Dipindai dengan CamScanner

BI 100 SRT (A4B) - MI

Lampiran 3 Daftar Hadir Magang



DAFTAR HADIR PROGRAM INVITASI MAHASISWA

Nama : Monica Inda Sari
 N I M : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi : Jl. Braga No.23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat. 40111

No	Hari	Tanggal	Datang		Pulang		Keterangan
			Jam	Paraf	Jam	Paraf	
1	Senin	20 Januari 2020	11.26		19.00		
2	Selasa	21 Januari 2020	6.57		18.29		
3	Rabu	22 Januari 2020	6.32		17.46		
4	Kamis	23 Januari 2020	6.45		19.34		
5	Jumat	24 Januari 2020	6.15		19.02		
6	Senin	27 Januari 2020	6.34		20.53		
7	Selasa	28 Januari 2020	6.42		20.18		
8	Rabu	29 Januari 2020	6.43		18.17		
9	Kamis	30 Januari 2020	6.42		18.48		
10	Jumat	31 Januari 2020	6.45		17.28		

Keterangan : I = izin, A = alpha, S = Sakit

Bandung, Januari 2020

Mengetahui,

(Bpk. Darjana)

Lampiran 4 Catatan Harian Invitasi



**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

CATATAN HARIAN INVITASI MAHASISWA

Nama : Monica Inda Sari
 N I M : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi : Jl. Braga No.23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat. 40111

No	Hari/Tgl	Jam	Jumlah Jam	Uraian Kegiatan	Hasil	Paraf PL	Keterangan
1	Senin/ 20, Jan 2020	09.00 - 19.00	10	- Briefing mengenai Peraturan di BI (magang) - Pembagian divisi - Perkenalan divisi - Membuat Surat SPH			
2	Selasa, 21 Jan 2020	09.00 - 18.20	11,5	- Membuat Surat liason - Materi dari Bpk. Darjana			
3	Rabu, 22 Jan 2020	09.00 - 17.48	10,5	- Mengunjungi area khazanah - Melihat area PUR - Mengunjungi area kliring - Memindahkan data dalam format excel (Pasar di Jabar)			
4	Kamis, 23 Jan 2020	09.00 - 19.34	12,5	- Mencari data PT contac baru dan existing (Notelp, email dll) - Materi dari Bpk. Darjana - Mengirim email kepada PT perihal kegiatan liasion			
5	Jumat 24 Jan 2020	06.30 - 19.02	12	- Senam / Kegiatan rutin hari Jumat - Mengikuti ricam BI seluruh Indonesia - Melanjutkan mengirim email			





INDONESIA
BANKING
SCHOOL

6	Senin, 27 Jan 2020	07.00 - 20.54	14	- Menelpon PT ya menguji lisan - Mengeprint Dary notes - update hasil survei RAD			
7	Selasa, 28 Jan 2020	07.00 - 20.18	13	- Materi mengenai Perekonomian Jabar - Menghubungi PT u/keg-lisason - update survei Ind.			
8	Rabu, 29 Jan 2020	07.00 - 18.17	11	- update survei RAD research - Klasikal menghubungi Pelaku Usaha			
9	Kamis, 30 Jan 2020	07.00 - 18.48	11.5	- update survei RAD research taw II - klasikal Kirim - Mencari data Industri listing			
10	Jumat, 31 Jan 2020	07.00 - 17.28	10.5	- Seram rutin - vidcon - mencari data 100 korporasi - Materi dr Paksaifi			

Penyusun

Monica Inda Sari

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

(Bpk. Edi Komara, S.E, MSi.)

Pembimbing Lapangan

(Bpk. Darjana)

Lampiran 5 Rencana Kegiatan Invitasi



RENCANA KEGIATAN INVITASI MAHASISWA

Nama : Monica Inda Sari
 NIM : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi : Jl. Braga No.23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat.
 40111

No	Kegiatan	Waktu	Januari									
			20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	Mendapatkan Materi tentang BI		✓				✓		✓	✓		
2	Mengetahui Sistem puz/cash & khazanah				✓							
3	Mengikuti kegiatan Kifing				✓							
4	Mengetahui spesifikasi jobsdesc di DAEK		✓	✓								
5	Melakukan Visitasi ke museum BI											
6	Klasikal (materi)									✓		
7	Mengikuti Senam pagi						✓					✓
8	update runvei RAD to III										✓	
9	Mengirim email					✓			✓	✓		
10	Menghubungi PT					✓			✓	✓		

Bandung, Januari 2020

Penyusun

Monica Inda Sari

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

(Bpk. Edi Komara, S.E, MSi.)

Pembimbing Lapangan

(Bpk. Darjana)

Lampiran 6 Pelaksanaan Kegiatan Invitasi



**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

PELAKSANAAN KEGIATAN INVITASI MAHASISWA

Nama : Monica Inda Sari
 NIM : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi : Jl. Braga No.23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat.
 40111

No	Kegiatan	Waktu	Januari									
			20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	Materi tentang BI		✓				✓		✓	✓		
2	Membuat Surat SPH & Liasion		✓	✓								
3	Mengunjungi Kuzarah				✓							
4	Melihat proses Kuring				✓							
5	Mencari data PR terkait keag. liasion					✓						
6	Mengirim email & menghubungi perusahaan					✓			✓	✓		
7	update hasil survei KAD								✓			
8	membuat hasil laporan Survei								✓			
9	update data pasardi Jabar di excel.				✓							
10	update Survei Industri										✓	

Bandung, Januari 2020

Penyusun



Monica Inda Sari

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



(Bpk. Edi Komara, S.E, MSi.)

Pembimbing Lapangan



(Bpk. Darjana)

Lampiran 7 Evaluasi Sikap



EVALUASI SIKAP MAHASISWA INVITASI

Nama : Monica Inda Sari
 N I M : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi : Jl. Braga No.23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat.
 40111

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	HUBUNGAN ANTAR MANUSIA				
	a. Mengadakan pendekatan kepada orang yang terkait dalam pekerjaan				✓
	b. Dapat berkomunikasi dengan semua orang yang terkait dalam pekerjaan				✓
2	PARTISIPASI & INISIATIF MAHASISWA DITEMPAT PRAKTIK KERJA				✓
3	TANGGUNGJAWAB DALAM TUGAS				
	a. Menerima beban tugas sesuai dengan prosedur				✓
	b. Melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya				✓
	c. Menggunakan setiap kesempatan untuk belajar/mendapatkan pengalaman				✓
	d. Meninggalkan tempat tugas setelah melakukan terima tugas				✓
4	KEJUJURAN				
	a. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di tempat praktik kerja				✓
	b. Membuat laporan sesuai data yang ada				✓
	c. Menandatangani daftar hadir sesuai waktu kehadirannya				✓
	d. Mengakui kesalahan yang telah dilakukan /tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain				✓
5	KEDISIPLINAN				
	a. Datang tepat waktunya				✓
	b. Mentaati tata tertib/ketentuan - ketentuan yang berlaku ditempat praktik dan pendidikan				✓



6	SOPAN SANTUN							
	Menghargai orang lain, yaitu terhadap :							
	a. Klien/masyarakat							✓
	b. Teman sejawat							✓
	c. Anggota tim							✓
7	KERJASAMA							
	a. Tidak sering terjadi kesalahpahaman dalam bekerja secara tim							✓
	b. Dapat bekerjasama dalam tim							✓
8	PENAMPILAN DIRI							
	a. Pakaian bersih dan rapi							✓
	b. Cekatan							✓
	c. Sabar							✓
	d. Tidak ragu-ragu dalam bertindak							✓
9	KETELITIAN							
	a. Dalam melaksanakan tugas, tidak sering melakukan kesalahan yang sama							✓
	b. Teliti menyelesaikan tugas dan hasilnya baik							✓
10	KEMATANGAN PROFESIONAL							
	a. Dalam melaksanakan tugas bertindak dengan tenang							✓
	b. Merahasiakan dan menghindari pembicaraan yang tidak perlu tentang nasabah/klien/masyarakat							✓

96

Bandung, 31 Januari 2020

Penilai

Pembimbing Lapangan

(Bpk. Darjana)

Keterangan :
Konversi Nilai :
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Lampiran 8 Evaluasi Keterampilan



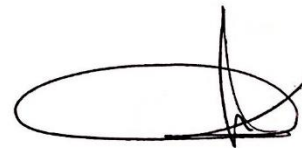
**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

EVALUASI KETERAMPILAN MAHASISWA INVITASI

Nama : Monica Inda Sari
 N I M : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi : Jl. Braga No.23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat. 40111

No	KOMPONEN YANG DINILAI	NILAI			
		1	2	3	4
1	PEMAHAMAN PERUSAHAAN/BANK				
	a. Pengetahuan organisasi bank				✓
	b. Pengetahuan tentang produk utama perusahaan				✓
	c. Pengetahuan dan pemahaman fungsi setiap bagian perusahaan			✓	
	d. Pengetahuan dan pemahaman Job Deskripsi setiap bagian perusahaan			✓	
	e. Pemahaman sistem dan prosedur kerja antar bagian dalam perusahaan			✓	
2	RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN				
	a. Kemampuan merencanakan kegiatan				✓
	b. Kesesuaian rencana dengan realisasi				✓
	c. Ketepatan waktu rencana dengan realisasi				✓
	d. Kesesuaian rencana dengan kompetensi mahasiswa				✓
	e. Kesesuaian rencana dengan bidang kerja dibagian perusahaan				✓
3	KEBERHASILAN PENYELESAIAN MASALAH				
	a. Kemampuan mengidentifikasi masalah				✓
	b. Kecepatan menyelesaikan masalah				✓
	c. Ketepatan menyelesaikan masalah			✓	
	JUMLAH SKOR				40

Penilai
Pembimbing Lapangan



Bpk. Darjana

Lampiran 9 Evaluasi Pengetahuan



EVALUASI PENGETAHUAN MAHASISWA INVITASI

Nama : Monica Inda Sari
 NIM : 20171112118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi : KPwDN Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi : Jl. Braga no. 23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat.
 40111.

No	KOMPONEN YANG DINILAI	Nilai			
		1	2	3	4
1.	TATA TULIS LAPORAN				
	a. Kebenaran ejaan				✓
	b. Kesesuaian penulisan dengan buku panduan				✓
	c. Relevansi materi dengan judul				✓
2.	PRESENTASI				
	a. Media penyampaian materi				✓
	b. Penyampaian materi sistematis				✓
	c. Penguasaan materi				✓
	d. Kedalaman materi			✓	
	e. Kesuaian jawaban dengan pertanyaan				✓
	f. <i>Eyes contact</i>				✓
	g. Gerak tubuh			✓	
JUMLAH SKOR					

*) diisi oleh Dosen Penguji/Dosen Pembimbing

Jambi, 31 Januari 2020

Keterangan:

Konversi Nilai:

4: Sangat Baik

3: Baik

2: Cukup

1: Kurang

Penilai

Pembimbing Pembimbing

(Bpk. Edi Komara, S.E, Msi.)

Lampiran 10 Rekapitulasi Nilai Magang



REKAPITULASI NILAI AKHIR INVITASI/PRAKTEK KERJA

Nama : Monica Inda Sari
 NIM : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi/Praktik Kerja : KPwDN Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi/ Praktik Kerja : Jl. Braga no. 23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat. 40111.

Keterangan	Skripsi(Pembimbing Lapangan) Bobot 25%	Keterampilan (Pembimbing Lapangan) Bobot 35%	Pengetahuan (Dosen Pembimbing) Bobot 40%	Interval NA (*). Total Nilai Akhir	NILAI HURUF
1. Nilai Per komponen	Nilai =(skor yang didapat/108)x100 $104/108 \times 96.$	Nilai=(skor yang didapat/52)x100 $48/52.$	Nilai=(skor yang didapat/40)x100 $38/40$	80-100 68-79 56-67 40-55 <40	A B C D E
	= 96,30.	= 92,31.	= 95		
2. Nilai Akhir (=bag.1x bobot)	= 24,075	= 32,31.	= 38.	*94.	A.

Jakarta, 20 Feb 2020

Dosen Pembimbing Praktik Kerja



(Bpk. Edi Komara, S.E, Msi.)

Lampiran 11 Lembar Bimbingan dengan Dosen Pembimbing



LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN INVITASI/PRAKTIK KERJA MAHASISWA

Nama : Monica Inda Sari
 N I M : 2017 111 2118
 Program Studi : Akuntansi
 Tempat Invitasi/Praktik Kerja : KPwDN Provinsi Jawa Barat
 Alamat Invitasi/ Praktik Kerja : Jl. Braga no. 23, Babakan Ciamis, Bandung, Jawa Barat. 40111.

No	Hari/ Tanggal	Konsultasi	Paraf Dosen Pembimbing	Paraf Mahasiswa	Keteran gan
1	10-02-20	Konfirmasi Laporan			
2	12-02-20	format laporan magang			
3	13-02-20	Informasi			
4	20-02-20	Revisi & TTD			
5	24-02-20	Hasil laporan			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Jakarta 20 Feb. 2020

● Dosen Pembimbing Praktik Kerja

(Bpk. Edi Komara, S.E, Msi.)